



**PERUBAHAN**  
**RENJA 2023**  
**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**



# DAFTAR ISI

<b>Uraian</b>	<b>Hal.</b>
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematisasi Penulisan .....	4
BAB II    EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II.....	5
2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 .....	22
BAB III   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	25
3.1 Tujuan dan sasaran .....	25
3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023	25
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2023 .....	21
BAB IV    PENUTUP .....	46

## DAFTAR TABEL

<b>Uraian</b>	<b>Hal.</b>
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 .....	6
Tabel 3.1 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023.....	26
Tabel 3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya operasional

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada Surat Edaran tentang pedoman penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta

didasarkan pada Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi samapai dengan Triwlan II Tahun berkenaan dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembarabn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomis di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto- Surabaya – Sidoarjo – Lamongan – Kawasan Bromo – Tengger – Semeru serta Kawasan Selingkar Wils dan Lintas Selatan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
13. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024
14. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2023
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja-PD dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan program dan kegiatan dalam sisa tahun berjalan yang berpedoman hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2023 berjalan serta dapat menjadi dasar penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan.

c. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah :

- 1) Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- 2) Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
- 3) Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Ranja samapi dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor yang timbul tidak tercapainya atau melebihi target kinerja program / kegiatan
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Hasil Evaluasi Renja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 2.1.a**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RENJA dan**  
**Pencapaian RENSTRA Biro Administrasi Pembangunan s/d Tahun 2019**  
*(Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019 – Berdasarkan Renstra 2014 – 2019 )*

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)		
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
								K	K	K	K	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
1		2					3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
1	Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan	1	3	03	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Lama)</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat / aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	1	19	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (kegiatan lama)	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100	100	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program lama)</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana Aparatur yang layak fungsi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	2	12	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (kegiatan lama)	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang dibeli	52	30	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	2	31	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (kegiatan lama)	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	36	20	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
								K	K	K	K	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)
1	2					3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
		1	3	03	7	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (program lama)</b>	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	100	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	7	1	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah (kegiatan lama)	Jumlah konsultasi	4.100	2.000	-	-	-	-	-
	Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan	1	3	03	7	2	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah (kegiatan lama)	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan/ pendidikan/pelatihan	173	65	-	-	-	-	-
		1	3	03	8	<b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah (Program Lama)</b>	<b>Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	8	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan (kegiatan lama)	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	32	12	-	-	-	-	-
		1	3	03	8	2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran (kegiatan lama)	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	32	12	-	-	-	-	-
		1	3	03	8	3	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data (kegiatan lama)	Jumlah update database Perangkat Daerah	8	4	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
								6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)		
1	2					3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan	1	3	03	30		<b>Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (Program Lama)</b>	<b>Persentase pengendalian administrasi pembangunan sesuai ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-
	1	3	03	31		<b>Program Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan (Program Lama)</b>	<b>Persentase kebijakan pembangunan yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-
	1	3	03	31	1	Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan secara Elektronik (kegiatan lama)	Jumlah notulen rapat	20	12	-	-	-	-	-	-
							Jumlah paket lelang yang dilelang melalui LPSE	6.700	4.100	-	-	-	-	-	-
	1	3	03	31	2	Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa, Rencana Umum Pengadaan dan jasa konstruksi (kegiatan lama)	Jumlah laporan pengendalian terhadap pengadaan barang /jasa	6	2	-	-	-	-	-	-
	1	3	03	31	3	Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Program Strategis (kegiatan lama)	Jumlah laporan pelaporan program strategis	10	4	-	-	-	-	-	-
	1	3	03	31	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik (kegiatan lama)	Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli	297	192	-	-	-	-	-	-
	1	3	03	31	5	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (kegiatan lama)	Jumlah paket yang selesai diproses	900	9000	-	-	-	-	-	-
	1	3	03	31	6	Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa (kegiatan lama)	Jumlah peserta Bimtek dan ujian pengadaan barang/jasa	35	35	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)		
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
										K	K					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)						
		1	3	03	31	7	Advokasi Pengadaan Barang/Jasa / Jasa (kegiatan lama)	Jumlah advokasi PBJ	8	8	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan	1	3	03	84		<b>Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan (Program Lama)</b>	<b>Persentase tingkat pelayanan administrasi pembangunan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	84	1	Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Lingkungan SKPD Prov. Jatim (Kegiatan Lama)	Jumlah peserta ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa	400	160	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	84	7	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim (Kegiatan Lama)	Jumlah pedoman kerja dan pelaksanaan tugas Pemprov. Jatim	5	4	-	-	-	-	-	-
		1	3	03	84	11	Penyusunan Standar Satuan Harga (kegiatan lama)	Jumlah rumusan kebijakan SSHBJ dan ASB	13	7	-	-	-	-	-	-

**Tabel 2.1.b**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RENJA dan**  
**Pencapaian RENSTRA Biro Administrasi Pembangunan s/d Tahun 2020**  
*(Berdasarkan Renstra 2019 – 2024)*

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
								K	K	K	K	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)
1	2					3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
Meningkatnya Kebijakan dibidang Pembangunan	1	3	03	01	Program Pelayanan Kesekretariatan	<b>1. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan</b>	82,5	-	82,2	80,79	98,16	-	-	-	
						<b>2. Persentase Indikator Program yang tercapai</b>	100	-	100	100	100	-	-	-	
						<b>3. Persentase realisasi anggaran</b>	97	-	95	95	97,93	-	-	-	
						<b>4. Indeks Profesionalitas ASN</b>	88	-	88	83	94,31	-	-	-	
	3	3	03	01	008	Penyusunan Pengelolaan Dokumen Perencanaan, Administrasi Keuangan, Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian	30	-	30	30	100	-	-	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
				K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
						K	K				
1		2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)
		<b>1 3 03 19</b>	<b>Program Sinkronisasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi</b>	<b>15</b>	-	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	-	-	-
		1 3 03 19 001	Penyelenggaraan administrasi pembangunan infrastruktur perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya	18	-	3	3	2020	-	-	-
		1 3 03 19 002	Penyelenggaraan administrasi pembangunan infrastruktur sumber daya air	13	-	2	2	100	-	-	-
		1 3 03 19 003	Penyelenggaraan kebijakan jasa konstruksi	14	-	2	2	100	-	-	-
		<b>1 3 03 20</b>	<b>Program sinkronisasi Infrastruktur Proyek Strategis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Kebinaamrgaan dan Perhubungan</b>	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	-	-	-
		1 3 03 20 001	Penyelenggaraan administrasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan sinergitas proyek strategis	25	-	3	3	100	-	-	-

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
										K	K				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)					
	1 3 03 20 002	Penyelenggaraan administrasi pembangunna infrastruktur kebinamargaan	Jumlah modul kebijakan infrastruktur kebinamrgaan	20	-	2	2	100	-	-	-				
	1 3 03 31 003	Penyelenggaraan administrasi pembangunan infrastruktur perhubungan	Jumlah modul kebijakan infrastruktur perhubungan	20	-	2	2	100	-	-	-				
	<b>1 3 03 21</b>	<b>Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan</b>	<b>Jumlah rumusan kebijakan</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
	1 3 03 21 001	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standar Satuan Harga	Jumlah modul pedoman pelaksanaan pembangunan dan standar satuan harga	20	-	4	4	100	-	-	-				
	1 3 03 21 002	Evaluasi dan Pengendalian Realisasi	Jumlah modul realisasi anggaran APBD dan APBN	23	-	4	4	100	-	-	-				



**Tabel 2.1.c**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Biro Administrasi Pembangunan s/d Tahun 2022**  
 (Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan – Berdasarkan Perubahan Renstra 2019 - 2024)

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Tingkat capaian (%)
		K	K	K	K	Tingkat Realisasi (%)		Target	Realisasi	Target	Realisasi capaian				
												K	K	K	
1	2					3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
Meningkatnya Kebijakan dibidang Pembangunan	x	x	x	0	1	<b>PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN</b>	<b>1. Persentase Indikator Program yang tercapai)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
							<b>2. Persentase realisasi anggaran</b>	<b>97</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>96,24</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>97,31</b>	<b>100</b>
							<b>3. Indeks Profesionalitas ASN</b>	<b>67</b>	<b>88</b>	<b>65</b>	<b>67,5</b>	<b>100</b>	<b>66</b>	<b>85,15</b>	<b>100</b>
							<b>4. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro AP</b>	<b>81,4</b>	<b>80,78</b>	<b>81,2</b>	<b>80,79</b>	<b>99,49</b>	<b>81,3</b>	<b>81,43</b>	<b>100</b>
	4	0	1	0	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1. Persentase Indikator Program yang tercapai</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
							<b>2. Persentase realisasi anggaran</b>	<b>97</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>96,24</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>97,31</b>	<b>100</b>

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Tingkat capaian (%)
				K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	
						K	K		9	10 (5+7+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
			<b>3. Indeks Profesionalitas ASN</b>	<b>67</b>	<b>83</b>	<b>66</b>	<b>67,5</b>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>85,15</b>	<b>100</b>
	4 01 01 101	<b>Keg Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah dokumen perencanaan anggaran perangkat Daerah</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100</b>
			<b>Jumlah dokumen pelaporan</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>75</b>
	4 01 01 101 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	2	2	2	100	11	11	100
	4 01 01 101 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA	4	1	1	1	100	1	1	100
	4 03 01 101 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	4	1	1	1	100	1	1	100
	4 01 01 101 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA	4	1	1	1	100	1	1	100

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Tingkat capaian (%)		
							K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian			
							K	K	K	K						
1	2				3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)			
		4	01	01	101	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA Perubahan	4	1	1	1	100	1	1	100
		4	01	01	101	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen capaian kinerja	18	6	6	6	100	6	6	100
		4	01	01	101	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah rumusan dokumen evaluasi renja	16	4	4	4	100	4	4	100
		4	01	01	102		<b>Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah dokumen administrasi keuangan</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
		4	01	01	102	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	12	12	12	100	12	12	100
		4	01	01	102	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah laporan verifikasi penatausahaan (	48	12	12	12	100	12	12	100
		4	01	01	102	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	48	12	12	12	100	12	12	100

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Tingkat capaian (%)
							K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	
									K	K				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)				
	4 01 01 102 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan SKPD	8	2	2	2	100	2	2	100			
	4 01 01 102 06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah laporan tanggapan atas LHP	4	1	1	1	100	1	1	100			
	4 01 01 102 08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis	4	1	1	1	100	1	1	100			
	4 01 01 103	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah laporan BMD</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>			
	4 01 01 103 01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	16	4	4	4	100	4	4	100			
	4 01 01 105	<b>Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian PD</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	12	12	<b>100</b>			
	4 01 01 105 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah laporan data pegawai	48	12	12	12	100	12	12	100			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Tingkat capaian (%)
							K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	
									K	K				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)				
	4 01 01 105 05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan SKP	48	12	12	12	100	12	12	100			
	4 01 01 105 94	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4	1	1	1	100	61	61	100			
	4 01 01 106	<b>Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100</b>			
	4 01 01 106 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	4	1	1	1	100	1	1	100			
	4 01 01 106 03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	4	1	1	1	100	1	1	100			
	4 01 01 106 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	4	1	1	1	100	1	1	100			
	4 01 01 106 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan	4	1	1	1	100	1	1	100			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Tingkat capaian (%)
				K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian	
						K	K		9	10 (5+7+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)	
	4 01 01 106 10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1. Jumlah daftar arsip aktif 2. Jumlah daftar arsip inaktif 3. Jumlah daftar arsip vital	1. 4 2. 4 3. 4	1. 1 2. 1 3. 1	1. 1 2. 1 3. 1	1. 1 2. 1 3. 1	1. 100 2. 100 3. 100	1. 1 2. 1 3. 1	1. 1 2. 1 3. 1	100
	4 01 01 107	<b>Keg Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
	4 01 01 107 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	4	1	1	1	100	1	1	100
	4 01 01 108	<b>Keg Peny. Jasa Penunjang Urusan PD</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
	4 01 01 108 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah pengiriman dokumen	4	1	1	1	100	1	1	100
	4 01 01 109	<b>Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>jumlah laporan aset tetap yang terpelihara</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Tingkat capaian (%)
		K	K	Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian					
				K	K									
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)				
	4 01 01 109 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	jumlah jasa	48	12	12	12	100	12	12	100			
	4 01 01 109 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	48	12	12	12	100	12	12	100			
	4 01 01 109 09	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	24	6	6	6	100	6	6	100			
	4 01 08	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi Pembangunan</b>	<b>60</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>100</b>			
	4 01 08 101	<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan</b>	<b>45</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>100</b>			



No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Tingkat capaian (%)	
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian		
										K	K					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)						
		4	01	08	101	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	jumlah dokumen modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	12	5	4	5	100	4	4	100
		4	01	08	101	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	jumlah dokumen modul kebijaka pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	16	4	4	4	100	4	4	100
		4	01	08	101	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (	Jumlah modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah 1, 2, 3	13	9	3	9	100	3	4	100
		4	01	08	102		<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>100</b>
		4	01	08	102	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	jumlah dokumen modul analisis capaian kinerja pembangunan daerah	13	3	3	4	100	3	4	100

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2019 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program kegiatan subkegiatan kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Tingkat capaian (%)	
								K	K	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi capaian		
										K	K					
1	2					3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 (5+7+9)	11= (10/4)		
		4	01	08	102	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen modul pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	12	3	2	2	100	2	2	100
		4	01	08	102	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	jumlah modul perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	13	6	3	4	100	3	16	100

Berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.1 diatas, hampir semua kegiatan yang perlu ditingkatkan realisasi kinerjanya telah mencapai 74,6 %, yaitu :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** yang terdiri dari Kegiatan:
  - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Administras Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. **Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**, dengan Kegiatan :
  - a. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
  - b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

## **2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Perangkat Daerah Tahun 2023**

Dalam melaksanakan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan menghadapi Permasalahan dan mencoba mengatasinya. Berikut Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah secara spesifik sesuai dengan Bidang Kejadiannya :

1. **Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD dan APBN**, menghadapi hambatan sebagai berikut :
  - a) *Entry* realisasi APBD dan APBN masih bersifat manual belum ada fitur export import data yang memudahkan Perangkat Daerah dalam melaporkan realisasinya.
  - b) Masih Kurangnya kesadaran pentingnya penyampaian laporan realisasi tepat waktu kepada Biro Administrasi Pembangunan

- c) ASN pada Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana dalam melaporkan realisasi anggaran belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas.

Dengan permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil upaya penyelesaiannya sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Koordinasi yang lebih intensif dalam percepatan realisasi APBD serta pelaporannya
- b) Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait percepatan integrasi data dengan instansi terkait untuk mempermudah Perangkat Daerah meng-*entry* data realisasi
- c) Memberikan bimbingan teknis, pendampingan dan pelatihan terkait aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP)

**2. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah**, Masalah yang dihadapi Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah yaitu masih banyak Kabupaten / Kota melaporkan progress pembangunannya secara berkala kepada Gubernur. Dengan Permasalahan tersebut upaya penyelesaian masalahnya yaitu merumuskan kebijakan pengendalian pelaksanaan pembangunan wilayah sinergi dengan Kabupaten / Kota

**3. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**, memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Dengan diberlakukan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Standar harga seperti Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Belanja (ASB) yang tertera di aplikasi tersebut data pendukung belum terverifikasi dengan lengkap (masih berproses verifikasi data pendukung dari usulan masing-masing Perangkat Daerah)
- b. Kurang optimalnya pemahaman yang intensif terkait dengan substansi Pedoman Kerja Kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur serta melakukan Analisa terhadap standar biaya umum yang dibutuhkan Perangkat daerah tetapi belum terdapat regulasi yang memayungi.
- c. kurang optimalnya koordinasi lintas sektor dalam rangka menganalisis klusterisasi daerah rawan bencana beserta kewenangannya
- d. Belum optimalnya persepsi masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat dengan masih tingginya angka BABS.
- e. Proses administrasi dalam penanganan Darurat Kerusakan Infrastruktur akibat Bencana Alam yang masih bersifat konvensional
- f. Peraturan yang dibentuk tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Keuangan Daerah masih ditemui tidak sejalan.

- h. Kurang optimal pendokumentasian realisasi fisik pembangunan infrastruktur yang di rekonsiliasikan dengan realisasi keuangan
- Permasalahan tersebut diatas dapat dilakukan upaya sebagai berikut :
- a. Koordinasi dengan stakeholder untuk penyusunan HSPK dan ASB sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - b. Melakukan kajian analisis daerah rawan bencana
  - c. Melakukan advokasi terhadap Kepala Daerah melalui pertemuan-pertemuan dan sosialisasi atau lokakarya terkait pentingnya Hidup Sehat dan perilaku bebas BABS.
  - e. Menyusun sistem berbasis teknologi informasi berupa aplikasi e-pedum untuk efektifitas dan efisiensi proses penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  - f. Menyusun sistem berbasis teknologi informasi untuk mendukung kelancaran proses administrasi dalam penanganan Darurat Kerusakan Infrastruktur akibat Bencana Alam
  - g. Aturan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengelolaan Keuangan Daerah akan disinkronisasi melalui Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  - h. Melakukan monitoring dan evaluasi data terkait capaian pembangunan infrastruktur yang bersumber dari anggaran APBD maupun APBN

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

Renja Biro Administrasi Pembangunan mengacu Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019-2024, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Maka visi Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Biro Administrasi Pembangunan dalam kurun waktu 2019-2024 akan mewujudkan tujuan **“Meningkatkan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan”** dengan Indikator tujuan **“Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan”**. Sedangkan Sasaran Biro Administrasi Pembangunan **“Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan”** dengan indikator Sasaran : **(1) Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan; (2) Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti; (3) Nilai Evaluasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat tujuan yang akan dilakukan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola penyusunan kebijakan dan pengendalian administrasi pembangunan berbasis TIK;
2. Membangun sistem administrasi implementasi kebijakan pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta monitoring, evaluasi dan pengendalian APBD dan APBN di tingkat provinsi yang transparan, akuntabel dan berbasis TIK.
3. Membangun sistem pengelolaan administrasi pembangunan yang efektif, transparan dan akuntabel;

#### **3.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sby	1. Persentase indikator program yang tercapai 2. Persentase realisasi anggaran 3. Indeks Profesional ASN	1. 100 2. 97 3. 67	9.911.513.000	XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sby	4. Persentase indikator program yang tercapai 5. Persentase realisasi anggaran 1. Indeks Profesional ASN	1. 100 2. 97 3. 67	10.070.240.220
XXX01101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sby	1. jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah 2. jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1. 13 2. 4	159.128.400	XXX01101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sby	1. jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah 2. jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1. 13 2. 4	167.275.400



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0110101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sby	'jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	15.830.000	XXX0110101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sby	'jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	15.830.000
XXX0110102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	2	6.045.600	XXX0110102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	2	6.045.600
XXX0110103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA - SKPD	2	4.490.400	XXX0110103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA - SKPD	2	5.696.400
XXX0110104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	2	4.370.600	XXX0110104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	2	4.370.600
XXX0110105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan	2	4.593.400	XXX0110105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sby	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan	2	4.593.400

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0110106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sby	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	115.840.000	XXX0110106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sby	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	122.245.000
XXX0110107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sby	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4	7.958.400	XXX0110107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sby	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4	8.494.400
XXX01102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sby	jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	12	7.017.406.400	XXX01102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sby	jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	12	6.416.674.000
			Jumlah dokumen administrasi keuangan	4					Jumlah dokumen administrasi keuangan	4	
XXX0110202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	sby	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	6.963.884.400	XXX0110202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	sby	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	6.348.590.000
XXX0110203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sby	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	12	25.693.800	XXX0110203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sby	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	12	40.255.800

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0110204	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sby	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12	7.839.000	XXX0110204	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sby	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12	7.839.000
XXX0110205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sby	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	8.506.100	XXX0110205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sby	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	8.506.100
XXX0110206	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sby	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindaklanjut	1	6.554.700	XXX0110206	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sby	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindaklanjut	1	6.554.700
XXX0110208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sby	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	4.928.400	XXX0110208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sby	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	4.928.400
XXX01103	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Sby	<b>jumlah laporan BMD</b>	<b>4</b>	<b>5.996.100</b>	XXX01103	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Sby	<b>jumlah laporan BMD</b>	<b>4</b>	<b>5.996.100</b>
XXX0110301	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sby	jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD	4	5.996.100	XXX0110301	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sby	jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD	4	5.996.100
XXX01105	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Sby</b>	<b>jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>	<b>12</b>	<b>303.471.200</b>	XXX01105	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Sby</b>	<b>jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>	<b>12</b>	<b>320.377.200</b>

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0110504	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sby	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	46.873.000	XXX0110504	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sby	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	46.873.000
XXX0110505	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sby	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12	53.708.438	XXX0110505	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sby	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12	31.006.500
XXX0110509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sby	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatiha	61	225.591.700	XXX0110509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sby	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatiha	61	242.497.700
<b>XXX01106</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Sby</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa</b>	<b>1</b>	<b>2.044.476.100</b>	<b>XXX01106</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Sby</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa</b>	<b>1</b>	<b>2.740.875.720</b>
XXX0110602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sby	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	568.691.350	XXX0110602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sby	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	1.000.582.850
XXX0110603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sby	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	505.391.467	XXX0110603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sby	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	592.021.762

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0110605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sby	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	242.107.800	XXX0110605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sby	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	325.471.800
XXX0110609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sby	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	713.795.483	XXX0110609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sby	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	820.169.308
XXX0110610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sby	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	9.490.000	XXX0110610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sby	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	2.630.000
XXX01107	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Sby	<b>jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	XXX01107	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Sby	<b>jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XXX0110707	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Sby	jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	0	0	XXX0110707	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Sby	jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	0	0
XXX01108	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Sby	<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1</b>	<b>15.010.000</b>	XXX01108	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Sby	<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1</b>	<b>9.937.000</b>
XXX0110801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sby	jumlah pengiriman dokumen	1	15.010.000	XXX0110801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sby	jumlah pengiriman dokumen	1	9.937.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaian	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX01109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sby	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	34	366.024.800	XXX01109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sby	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	34	409.104.800
XXX0110904	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Sby	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	12	76.384.800	XXX0110904	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Sby	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	12	82.234.800
XXX0110906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sby	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	12	49.640.000	XXX0110906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sby	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	12	86.870.000
XXX0110908	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Sby	jumlah pemeliharaan aset tak berwujud	12	240.000.000	XXX0110908	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Sby	jumlah pemeliharaan aset tak berwujud	12	240.000.000
40108	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jatim	Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi Pembangunan	16	6.265.511.000	40108	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jatim	Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi Pembangunan	16	6.699.350.780

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40108101	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	<i>jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan</i>	11	3.974.875.000	40108101	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	<i>jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan</i>	11	4.208.714.780
4010810101	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jatim	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	4	724.119.920	4010810101	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jatim	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	4	734.119.200
4010810102	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jatim	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	4	751.985.080	4010810102	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jatim	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	4	775.825.580
4010810103	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jatim	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	3	2.498.770.000	4010810103	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jatim	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	3	2.698.770.000



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Keluaran		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)				Tolok Ukur	Target Capaia	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40108102	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	<i>jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan</i>	3	2.290.636.000	40108102	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	<i>jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan</i>	3	2.490.636.000
4010810201	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jatim	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang disediakan	3	342.905.000	4010810201	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jatim	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang disediakan	3	427.905.000
4010810202	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah	3	465.666.000	4010810202	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jatim	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah	3	480.666.000
4010810203	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jatim	Jumlah dokumen hasil fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	3	1.482.065.000	4010810203	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jatim	Jumlah dokumen hasil fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	3	1.582.065.000

### **3.3 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023**

Berdasarkan hasil review dan Analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikator beserta pada dokumen Perubahan RKPD 2023, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun table perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Biro Administrasi Pembangunan pada saat sebelum perubahan dilaksanakan dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Administrasi Pembangunan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 3.2

## Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolok ukur	Ta		Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Persentase indikator program yang tercapai 2. Persentase realisasi anggaran 3. Indeks Profesional ASN	1. 100 2. 97 3. 67	Sby	1. Persentase indikator program yang tercapai 2. Persentase realisasi anggaran 3. Indeks Profesional ASN	1. 100 2. 97 3. 67	Sby	9.911.513.000	10.070.240.220	-158.727.220	APBD
XXX01101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah 2. jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1. 12 2. 4	Sby	1. jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah 2. jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1. 12 2. 4	Sby	159.128.400	167.275.400	8.147.000	APBD
XXX0110101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Sby	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Sby	15.830.000	15.830.000	-	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolok ukur	Ta		Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0110102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	2	Sby	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	1	Sby	6.045.600	6.045.600	-	APBD
XXX0110103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA - SKPD	2	Sby	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA - SKPD	1	Sby	4.490.400	5.696.400	-	APBD
XXX0110104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	2	Sby	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	1	Sby	4.370.600	4.370.600	-	APBD
XXX0110105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan	2	Sby	jumlah dokumen DPA Perubahan	1	Sby	7.373.091	4.593.400	-	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolok ukur	Ta		Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0110106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	Sby	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	Sby	115.840.000	122.245.000	6.405.000-	APBD
XXX0110107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4	Sby	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4	Sby	7.958.400	8.494.400	536.000	APBD
XXX01102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	12	Sby	jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	12	Sby	7.017.406.400	6.416.674.000	600.732.400	APBD
		Jumlah dokumen administrasi keuangan	4	Sby	Jumlah dokumen administrasi keuangan	4					
XXX0110202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Sby	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Sby	6.963.884.400	6.348.590.000	615.294.400	APBD
XXX0110203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	12	Sby	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	12	Sby	25.693.800	40.255.800	14.562.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolok ukur	Ta		Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0110204	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12	Sby	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12	Sby	7.839.000	7.839.000	-	APBD
XXX0110205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	Sby	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	Sby	8.506.100	8.506.100	-	APBD
XXX0110206	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindaklanjut	1	Sby	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindaklanjut	1	Sby	6.554.700	6.554.700	-	APBD
XXX0110208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	Sby	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	Sby	4.928.400	4.928.400	-	APBD
XXX01103	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah laporan BMD</b>	<b>4</b>	<b>Sby</b>	<b>jumlah laporan BMD</b>	<b>4</b>	<b>Sby</b>	<b>5.996.100</b>	<b>5.996.100</b>	<b>-</b>	<b>APBD</b>
XXX0110301	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD	4	sby	jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD	4	sby	5.996.100	5.996.100	-	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolok ukur	Ta		Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX01105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12	sby	jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12	sby	303.471.200	320.377.200	16.906.000	APBD
XXX0110504	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Sby	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Sby	46.873.000	46.873.000	-	APBD
XXX0110505	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12	Sby	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12	Sby	53.708.438	31.006.500	22.701.938	APBD
XXX0110509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	61	Sby	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	61	Sby	225.591.700	242.497.700	16.906.000	APBD
XXX01106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	1	Sby	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	1	Sby	2.044.476.100	2.740.875.720	696.399.620	APBD
XXX0110602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Sby	jumlah paket pengadaan	1	Sby	568.691.350	1.000.582.850	431.891.500	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolok ukur	Ta		Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0110603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Sby	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Sby	505.391.467	592.021.762	86.630.295	APBD
XXX0110605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Sby	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Sby	242.107.800	325.471.800	83.364.000	APBD
XXX0110609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	Sby	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	Sby	713.795.483	820.169.308	106.373.825	APBD
XXX0110610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	Sby	1 Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	Sby	9.490.000	2.630.000	6.860.000	APBD
XXX01107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana</i>	0	Sby	<i>jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana</i>	0	Sby	-	-	-	APBD
XXX0110707	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	1	Sby	jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	1	Sby	-	-	-	APBD



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolok ukur	Ta		Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX01108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	1	Sby	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	1	Sby	15.010.000	9.937.000	5.073.000	APBD
XXX0110801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah pengiriman dokumen	1	Sby	jumlah pengiriman dokumen	1	Sby	15.010.000	9.937.000	5.073.000	APBD
XXX01109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	34	Sby	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	34	Sby	366.024.800	409.104.800	43.080.000	APBD
XXX0110904	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	12	Sby	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	12	Sby	76.384.800	82.234.800	5.850.000	APBD
XXX0110906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	12	Sby	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	12	Sby	49.640.000	86.870.000	37.230.000	APBD
XXX0110908	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah pemeliharaan aset tak berwujud	12	Sby	jumlah pemeliharaan aset tak berwujud	6	Sby	240.000.000	240.000.000	-	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolok ukur	Ta		Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40108	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	<i>Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi Pembangunan</i>	16	Jatim	Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi Pembangunan	16	Jatim	6.265.511.000	6.699.350.780	433.839.780	APBD
40108101	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi pelaksanaan pembangunan</i>	11	Jatim	<i>jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi pelaksanaan pembangunan</i>	11	Jatim	3.974.875.000	4.208.714.780	230.839.780	APBD
4010810101	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	4	Jatim	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	4	Jatim	724.119.920	734.119.200	9.999.280	APBD
4010810102	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	4	Jatim	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	4	Jatim	751.985.080	775.825.580	23.840.500	APBD
4010810103	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	3	Jatim	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	3	Jatim	2.498.770.000	2.698.770.000	200.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolok ukur	Ta		Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40108102	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan</i>	3	Jatim	<i>jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan</i>	3	Jatim	2.290.636.000	2.490.636.000	200.000.000	APBD
4010810201	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang disediakan	3	Jatim	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang disediakan	3	Jatim	342.905.000	427.905.000	115.000.000	APBD
4010810202	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah	2	Jatim	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah	3	Jatim	465.666.000	480.666.000	15.000.000	APBD
4010810203	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	3	Jatim	Jumlah dokumen hasil fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	3	Jatim	1.482.065.000	1.582.065.000	100.000.000	APBD

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan RKPD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan visi serta misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Perubahan Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh staf Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2023, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Surabaya, 30 Juni 2023

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



**Ir. SIGIT PANCENTOEN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660729 199703 1 001